

# SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING

**31 OKTOBER 2015**

OPTIMALISASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA  
YANG BERKUALITAS MENGHADAPI TANTANGAN  
DAN PELUANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

# PROSIDING



ISSN: 2502-163X

# SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING

**31 OKTOBER 2015**

OPTIMALISASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA  
YANG BERKUALITAS MENGHADAPI TANTANGAN  
DAN PELUANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

# PROSIDING

Dewan Editor:

Dr. M. Jumarin, M.Pd.  
Anita Dewi Astuti, M.Pd.  
Kris Bawa Riyanta, M.Pd.  
Wahyu Purwadi, S.Pd.

**Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan  
Program Studi Bimbingan dan Konseling  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
IKIP PGRI Wates  
Yogyakarta**

# SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING **PROSIDING**

31 OKTOBER 2015

OPTIMALISASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA  
YANG BERKUALITAS MENGHADAPI TANTANGAN  
DAN PELUANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

**Dewan Editor:**

Dr. M. Jumarin, M.Pd.  
Anita Dewi Astuti, M.Pd.  
Kris Bawa Riyanta, M.Pd.  
Wahyu Purwadi, S.Pd.

First Published, 2015

ISSN: 2502-163X

**Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan  
Program Studi Bimbingan dan Konseling  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
IKIP PGRI Wates  
Yogyakarta**

## **PENGANTAR REDAKSI**

Sudah seharusnya Bangsa Indonesia bersiap menghadapi ketatnya persaingan di tahun 2015 mendatang. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang akan berperan di dalam menjawab tantangan dan peluang MEA, oleh karena itu adanya pembahasan, diskusi, tukar pikiran yang mampu memformulasikan cara tepat dalam menghadapi peluang dan tantangan itu merupakan tanggungjawab kita semua.

Seminar Bimbingan dan Konseling merupakan kegiatan rutin tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Wates dalam rangka pemenuhan kebutuhan Tri Darma Perguruan Tinggi dan berpartisipasi aktif dalam menjawab tantangan dan peluang dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Peserta berasal dari Perguruan Tinggi dari beberapa propinsi di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera Selatan, Papua. Abstrak yang masuk ke panitia berjumlah 25, yang terseleksi sejumlah 10 Abstrak. Makalah yang dipresentasikan dan dimuat dalam posiding sebanyak 15 Judul Makalah. Seminar ini juga bertujuan secara khusus untuk memfasilitasi para peneliti, praktisi, mahasiswa dan instansi untuk melakukan tukar pikiran dan pengalaman dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam jangka panjang diharapkan para peneliti, praktisi maupun mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap pembangunan nasional dan kemandirian Indonesia.

Yogyakarta, 31 Oktober 2015  
Redaksi,

ttd

**Dr. M. Jumarin, M.Pd.**

## KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah*, Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Tuhan seluruh alam. Atas petunjuk dan nikmatNya kegiatan Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Tahun 2015 dengan tema “Optimalisasi Layanan Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Menghadapi Tantangan dan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN” dapat terlaksana dengan baik. Seminar ini merupakan bagian dari program rutin yang dilaksanakan oleh Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Wates di dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan ikut andil dalam pengembangan pendidikan dan kemandirian bangsa Indonesia.

Seminar ini mencakup seluruh layanan Bimbingan dan Konseling juga mencakup semua bidang Bimbingan dan Konseling, dari bidang Belajar, Pribadi, Sosial dan Karir. Seminar ini sebagai sarana ilmiah dalam berdiskusi, bertukar pikiran berkaitan dengan peluang dan tantangan MEA yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Peserta seminar terdiri dari Para Pemerhati pendidikan, Praktisi Pendidikan, MGBK/ Pengurus ABKIN Daerah, Dosen, Mahasiswa S1, S2, maupun S3 yang berasal dari perguruan tinggi di Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur, serta beberapa dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Papua.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada para pembicara di Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling yang telah berkenan hadir.

1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons selaku Presiden/Pengurus Besar ABKIN.
2. dr. Hasto Wardoyo, S.PoG (K), beliau adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
3. Dr. M. Jumarini, M.Pd. selaku Rektor IKIP PGRI Wates.
4. Pemakalah Kontributor, peserta seminar sehingga seminar ini dapat terlaksana.
5. Panitia Seminar yang telah bekerja keras, sungguh-sungguh dan penuh dedikasi dalam mengorganisasi kegiatan ini.
6. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah ikut andil dalam penyelenggaraan seminar ini.

Semoga apa yang telah dilakukan membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ka. Prodi  
Bimbingan dan Konseling

ttd

**Anita Dewi Astuti, M.Pd**

## PENDAHULUAN

Globalisasi telah melahirkan berbagai kesepakatan, diantaranya adalah kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan berlaku mulai tahun 2016. Ada lima pilar dalam MEA, yaitu (1) free flow of goods, (2) free flow of service, (3) free flow of investment, (4) free flow of skilled labour, (5) free flow of capital. Untuk menghadapi kompetisi di era MEA dituntut SDM yang berkualitas. Layanan BK di sekolah sebagai bagian yang integral dalam sistem pendidikan di Indonesia, memiliki peran strategis untuk menyiapkan peserta didik sebagai SDM yang berkualitas. Fakta di lapangan menunjukkan belum optimalnya kualitas SDM khususnya pada siswa, dan dalam tataran praktis layanan BK di sekolah belum optimal dan masih banyak menghadapi berbagai persoalan, baik yang terkait profesionalitas konselor, pelayanan dan sistem manajemen. Kondisi di atas dan ekspektasi masyarakat menuntut kajian yang mendalam tentang layanan BK di sekolah. Seminar Nasional BK yang diselenggarakan Prodi BK IKIP PGRI Wates ini diharapkan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kreatif, konstruktif, aplikatif dan relevan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi layanan BK di sekolah. Beberapa isu penting dikaji dalam seminar nasional ini, yaitu profesionalisasi konselor, pengembangan soft skills, pelaksanaan layanan BK, dan layanan BK karir. Berbagai analisis tersebut tersaji dalam Prosiding Seminar Nasional BK yang diselenggarakan oleh Prodi BK IKIP PGRI Wates ini.

Persoalan profesionalisasi konselor, dikaji secara teoritik dan secara empirik. Sebagai ketua PB ABKIN, Prof Mungin Edy Wibowo MPd Kons, menjelaskan bahwa menghadapi MEA, pelayanan konseling harus mampu membantu mengaktualisasikan keunggulan dan optimalisasi kemampuan manusia. Pengembangan kemampuan manusia menunjuk pada konstelasi keterampilan, sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian, sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi dunia. Layanan konseling yang demikian hanya dapat dilakukan oleh konselor atau Guru BK yang profesional. Oleh karena pengembangan profesionalitas guru pembimbing mutlak diperlukan. Profesi konselor harus bertumpu pada trilogi profesi yaitu dasar keilmuan, substansi profesi, dan praktek profesi, sehingga profesi konselor akan bermartabat. Paparan Prof. Mungin tersebut sungguh sangat substansial, sebab layanan BK yang optimal hanya dapat dilakukan oleh konselor yang profesional. Sementara itu secara empirik Suharcariyanto dan Mujiyanto memaparkan hasil penelitian tentang kualitas profesional konselor khususnya di Kab Purworejo, yang menunjukkan bahwa rata-rata guru BK SMA dan SMK se-Kabupaten Purworejo memiliki kompetensi profesional dalam kategori tinggi, rata-rata 80,86 %, terkait penguasaan konsep dan praksis asesmen, penguasaan kerangka teoritik dan praksis BK, merancang program BK, mengimplementasikan program BK, menilai proses dan hasil kegiatan BK, dan memiliki kesadaran dan komitmen terhadap

etika profesional. Temuan penelitian tersebut memberikan gambaran umumnya guru BK SLTA memiliki kompetensi profesionalitas yang relatif tinggi.

Terkait pengembangan beberapa aspek soft skills siswa dibahas dalam empat makalah. Dr. M. Jumarini MPd, menekankan bahwa menghadapi MEA diperlukan SDM yang berkualitas, khususnya terkait soft skills. Kompetensi soft skills memberikan kontribusi yang signifikan dalam kesuksesan kehidupan dan pekerjaan. Layanan BK di sekolah memiliki peran yang strategis dalam pengembangan soft skills, dan pengembangan soft skills melalui layanan BK harus dilakukan dengan asas keterpaduan, berkesinambungan, kekinian, dilaksanakan melalui berbagai fungsi BK, pendekatan BK, berbagai bidang BK, berbagai program BK, serta menggunakan beragam metode secara kreatif dan inovatif. Sementara itu Anita Dewi Astuti, mengemukakan hasil penelitian tentang model pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal dengan teknik permainan. Model yang dikembangkan tersebut efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Sugiyadi dan Filaeli Fatmawati dari Universitas Muhammadiyah Magelang memaparkan layanan konseling kelompok dapat meningkatkan motivasi siswa dalam berbicara di depan orang lain, dengan indikator: siswa merasa diterima, dihormati, dan dihargai keberadaannya dalam berbicara di depan orang lain, merasa terbiasa dan terlatih dalam menyampaikan ide, berpendapat atau mengemukakan gagasannya dalam berbicara di depan orang lain. Sukoco dan Hastin Budisiwi dari Universitas Pancasakti Tegal menganalisis fenomena layanan BK Pribadi-sosial untuk mereduksi kebiasaan merokok. Melalui layanan BK pribadi-sosial, siswa diberikan pemahaman, pencegahan, pengentasan dari perilaku merokok.

Berbagai analisis dan temuan penelitian terkait pengembangan aspek soft skills di atas semakin memperkuat urgensi dan pelaksanaan layanan BK dalam pengembangan aspek soft skills. Pengembangan soft skills dalam layanan BK memang bukan sesuatu yang baru, dan kajian dalam makalah dan hasil penelitian di atas sungguh memberikan ruh baru, pemikiran yang komprehensif tentang model, pendekatan dalam pengembangan soft skills melalui layanan BK.

Praktek layanan BK yang berkualitas dibahas dalam lima makalah yang disajikan oleh para akademisi dan praktisi BK. Agus Basuki dosen Prodi BK UNY menganalisis menghadapi globalisasi khususnya MEA perlunya membangun budaya inklusi di sekolah melalui kolaborasi antara konselor dan guru mata pelajaran. Siswa terutama yang berkebutuhan khusus harus dilayani secara optimal, melalui membangun budaya inklusi di sekolah, agar mereka berkembang optimal. Sementara Caraka Putra Bakti dan Nindiya ES. dari UAD Yogyakarta membahas implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk dijadikan rujukan penyelenggaraan BK di sekolah. Orientasi layanan BK mengarah pada perkembangan, penggunaan asesmen, penekanan prinsip kolaborasi. Konselor dituntut untuk memahami, menginternalisasi dan mengimplementasikan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Agus S. Dwiartanto, Mujiono, Sugeng sebagai praktisi memaparkan layanan BK di sekolah dengan program komprehensif. Agus S. Dwiartanto menjelaskan bahwa dukungan system merupakan pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan. Hal ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan layanan BK yang efektif dan efisien. Mujiono menganalisis layanan dasar dalam BK, tujuannya agar siswa memiliki kompetensi dasar dan keterampilan hidup, agar mampu



mengembangkan perilaku efektif. Dalam pelaksanaan diperlukan model atau strategi sesuai kebutuhan siswa dan sumber daya yang tersedia. Sementara Sugeng menganalisis layanan responsive, yang merupakan layanan segera untuk merespon kebutuhan khusus, atau permasalahan yang dihadapi konseli yang dapat dilakukan melalui layanan konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, layanan alih tangan dan sebagainya. Layanan Perencanaan Individual membantu konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman diri, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya.

Menghadapi MEA, para siswa sebagai calon tenaga kerja harus memiliki kesiapan karir, dan hal ini dapat dilakukan melalui layanan BK karir. Permasalahan BK karir ini dibahas dalam empat makalah. Elia Firda Mufidah dari UNIPA Surabaya dan Kholili dari SMPN 2 Gresik menyajikan hasil penelitian tentang penggunaan Genogram dalam layanan konseling karir. Mereka menyimpulkan temuannya, bahwa penggunaan genogram dalam konseling karir berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan perencanaan karier siswa. Imroatun Nisa, mahasiswa Pasca Sarjana UNY menganalisis pendekatan Purpose-centered untuk menemukan arti dan tujuan hidup dalam pencapaian karir. Dikatakan karir merupakan identitas seseorang, dan kesuksesan karir merupakan unsur prestise (harga diri), oleh karena itu diperlukan perencanaan karir. Perencanaan karir yang tepat apabila ada kesesuaian keadaan dalam diri lingkungan, serta yang lebih mendasar harus ada kesesuaian dengan tujuan dan arti hidup. Analisis terakhir dikemukakan Wahyu Purwadi dari IKIP PGRI Wates, terkait pengukuran minat dalam layanan BK karir. Dikatakan prestasi karir diantaranya dipengaruhi oleh minat, dan untuk mendapatkan kepuasan karir di masa yang akan datang, individu mengetahui tentang minat dan kemampuannya, oleh karena itu diperlukan pengukuran minat. Hasil pengukuran minat dapat digunakan untuk memprediksi pilihan karir yang tepat, sehingga sejak awal sudah ada persiapan, perencanaan, dan kemajuan karir kearah yang diinginkan.

Kajian dan analisis dalam seminar Nasional tersebut, meskipun belum secara komprehensif membahas optimalisasi layanan BK dalam menyiapkan peserta didik untuk menghadapi MEA, namun berbagai sajian analisis dalam seminar tersebut cukup memberikan analisis yang dalam, menyajikan berbagai alternatif pemikiran dalam praktek terbaik layanan BK di sekolah dalam rangka meningkatkan layanan BK di sekolah dan pengembangan keilmuan BK. Sudah barang tentu kajian-kajian keilmuan seperti ini harus terus dilakukan dan dikembangkan, agar bidang keilmuan dan praktek layanan Bimbingan dan Konseling dapat memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi kehidupan umat manusia.

Wates, 31 Oktober 2015

Tim Editor

## DAFTAR ISI

1. Pengembangan Profesionalitas Konselor atau Guru BK Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean <i>Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.</i> .....	1
2. Pengembangan Soft Skills Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Dr. M. Jumarin, M.Pd.</i> .....	23
3. Pengembangan Model Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Permainan ( <i>Games</i> ) untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa <i>Anita Dewi Astuti, M.Pd</i> .....	33
4. Kolaborasi Konselor dan Guru dalam Membangun Kultur Inklusi Sekolah <i>Agus Basuki, M.Pd</i> .....	39
5. Group Counseling Service to Improve Public Speaking Motivation (A Strategic Effort in Facing MEA 2015) <i>Sugiyadi, M.Pd, Kons. &amp; Filaeli Fatmawati</i> .....	47
6. Implementasi Permendikbud RI Nomor 111 Tahun 2014 dalam Pengembangan Layanan BK di Sekolah Menengah <i>Caraka Putra Bhakti, M.Pd. &amp; Nindiya Eka Safitri</i> .....	55
7. Penggunaan Genogram dalam Konseling Karier untuk Meningkatkan Perencanaan Karier Siswa Kelas VIII SMPN 2 Gresik <i>Elia Firda Mufidah, M.Pd. &amp; Kholili</i> .....	63
8. Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial untuk Mereduksi Kebiasaan Merokok pada Peserta Didik <i>Drs. Sukoco, KW, M.Pd. &amp; Hastin Budisiwi, S.Psi, M.Pd.</i> .....	69
9. Optimalisasi Dukungan Sistem, Manajemen dan Administrasi Bimbingan dan Konseling <i>Drs. Agus Sutik Dwiartanta</i> .....	77
10. Kompetensi Profesional Guru BK SMA dan SMK Pelaksana Kurikulum 2013 Se Kabupaten Purworejo <i>Suhas Caryono, M.Si. &amp; Mujiyanto, S.Pd</i> .....	81
11. Pendekatan Purpose-Centered: Sebuah Kekuatan untuk Menemukan Arti dan Tujuan Hidup dalam Pencapaian Karir <i>Imrotun Nisa, S.Pd</i> .....	89
12. Optimalisasi Layanan Responsif dan Perencanaan Individual <i>F. Sugeng Subagyo, S.Pd., M.Si.</i> .....	95
13. Optimalisasi Pelayanan Dasar Bimbingan dan Konseling <i>Mujiono, S.Pd., M.Pd.</i> .....	99
14. Pengukuran Minat, Kemampuan dan Prediksi Pemilihan Karir <i>Wahyu Purwadi, S.Pd</i> .....	103

# IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NOMOR 111 TAHUN 2014 DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN BK DI SEKOLAH MENENGAH

Caraka Putra Bhakti, M.Pd  
Nindiya Eka Safitri

## ABSTRACT

*Guidance and counseling in schools is the effort to develop the personality of students through a variety of guidance and counseling service which oriented on improving the quality of education at schools in order to establish the independence and optimal development of students. Guidance and counseling service can be performed by guidance and counseling teacher/ counselor, either directly or indirectly, in a classical, groups and individuals setting. Guidance and counseling programs can not be done solely by guidance and counseling teacher/ counselor, but it requires the collaboration of various stakeholders. In practice, there are specific guidelines as the reference basis for the implementation of guidance and counseling in schools, namely Ministerial Regulation No. 111 Year 2014 about Guidance and Counseling On Primary and Secondary Education which explores the principles of collaboration. These guidelines include four main program elements are designed according to the principle of the development task, namely the basic service, individual planning, responsive and support systems. Adherence to these guidelines will affect the performance of guidance and counseling teacher/ counselor. Therefore, these guidelines become the main reference for counseling teacher/ counselor and must be implemented in the administration of guidance and counseling in a school which is effective and efficient.*

**Keywords:** *guidance and counseling, collaboration, guidance and counseling teacher/ counselor*

## A. PENDAHULUAN

Saat ini, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tuntutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan suatu bentuk target pencapaian yang digagas oleh ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas. Salah satu tuntutan dalam MEA adalah tersedianya SDM yang bermutu.

Pemenuhan tuntutan ini tidak terlepas dari peran pendidikan. SDM yang bermutu dapat tercapai melalui pendidikan yang bermutu. Juntika (2011) mengungkapkan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik memenuhi kebutuhannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Menurut Tilaar dalam Juntika (2011), untuk mencapai hasil

pendidikan yang bermutu, diperlukan proses pendidikan yang bermutu. Kemampuan yang diberikan melalui proses pendidikan bermutu tidak hanya menyangkut aspek akademis saja, tetapi juga menyangkut berbagai aspek kehidupan yang komprehensif yakni perkembangan pribadi, sosial, kematangan individu, dan sistem nilai.

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral proses pendidikan memiliki kontribusi dalam penyiapan SDM bermutu. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, peserta didik merupakan individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (*becoming*), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan, individu memerlukan bimbingan, karena masih kurang memahami kemampuan dirinya, lingkungannya dan pengalaman untuk mencapai kehidupan yang baik (menjadi SDM bermutu).

Di sini, terlihat bahwa bimbingan dan konseling yang berfokus pada perkembangan peserta didik sangat urgen. Fajar Santoadi (2010) mengungkapkan bahwa secara implisit bimbingan dan konseling saat ini sudah berorientasi perkembangan. Semenjak tahun 1970-an, terutama di negara-negara maju (misalnya negara-negara bagian Amerika) mulai berkembang model program bimbingan dan konseling komprehensif.

Dede Rahmat Hidayat (2013) mengungkapkan bahwa model bimbingan dan konseling komprehensif dirancang untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh konselor sekolah. Model ini dikembangkan berdasarkan berbagai hasil kajian teori, dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh ASCA tentang program bimbingan dan konseling dan profesi konselor sekolah. Model ini merupakan alternatif model bimbingan dan konseling yang memberikan kesempatan bagi akademisi dan praktisi konseling untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Meskipun model ini diadopsi dari model ASCA yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh bimbingan dan konseling di Amerika Serikat, namun model ini dapat diadaptasikan di Indonesia. Model bimbingan dan konseling komprehensif memberikan kesempatan bagi ilmu bimbingan dan konseling di Indonesia melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Adaptasi model bimbingan dan konseling komprehensif memberi peluang kepada konselor untuk menunjukkan kinerjanya, sehingga profesi bimbingan dan konseling mendapatkan pengakuan di masyarakat.

Untuk dapat mengadopsi model bimbingan dan konseling komprehensif, pemerintah Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Substansi dari permendikbud ini meliputi komponen program, bidang layanan, struktur program layanan, serta kegiatan dan alokasi waktu. Permendikbud tidak secara eksplisit membahas tentang bimbingan dan konseling komprehensif, tetapi dilihat dari substansinya ini menunjukkan versi model bimbingan dan konseling komprehensif.

Untuk dapat meningkatkan mutu layanan dan kinerja, guru BK perlu merujuk pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 ini. Keempat substansi yang termaktub dalam permendikbud ini menjadi kunci keberhasilan guru BK/konselor dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Dengan demikian, guru BK/konselor sangat diharapkan mampu mengembangkan layanan bimbingan dan konseling sesuai substansi permendikbud di atas. Namun, kinerja konselor/guru BK saat ini belum sejalan dengan apa yang diharapkan. Di luar sana masih banyak guru BK/konselor yang belum paham akan teori dan praksis bimbingan dan konseling di sekolah yang benar. Dari perspektif tersebut di atas, penulis membahas mengenai implementasi Permendikbud No. 111 Tahun 2014 dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah yang lebih baik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Bimbingan dan Konseling di Era MEA**

Paradigma kehidupan di era MEA telah menimbulkan situasi kehidupan yang semakin kompleks, dimana peserta didik dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan serta ketidakmenentuan. Dalam situasi tersebut peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang secara efektif, produktif, dan bermanfaat serta bermaslahat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Pengembangan kompetensi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan pada satuan pendidikan. Djohar (2006) memandang bahwa pendidikan hakikatnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan peserta didik untuk masa depannya untuk menyongsong kehidupan dunia yang menunggunya. Pengembangan tersebut yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga memerlukan layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling. Berbagai aktivitas bimbingan dan konseling dapat diupayakan untuk mengembangkan

potensi dan kompetensi hidup peserta didik yang efektif serta memfasilitasi mereka secara sistematis, terprogram, dan kolaboratif agar setiap peserta didik betul-betul mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan.

Menurut Boharudin (2011), bersamaan dengan perkembangan global di era MEA, maka bimbingan dan konseling mengalami kecenderungan untuk bergeser dari situasi isolasi atau soliter ke arah keterkaitan dengan berbagai aspek dan dimensi dalam prosesnya. Dengan demikian maka bimbingan dan konseling tidak hanya menyentuh aspek permukaan saja tetapi lebih menyeluruh dan utuh sehingga permasalahan peserta didik/konseli dapat diselesaikan secara tuntas. Di lingkungan pendidikan, layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara terpadu (komprehensif) dengan mencakup berbagai bidang layanan dan jenis layanan, dengan melibatkan segenap personel sekolah dan pihak terkait lainnya. Bidang-bidang layanan yang diberikan meliputi bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Jenis layanan mencakup layanan di dalam kelas dan di luar kelas.

Dalam perspektif MEA, bimbingan dan konseling di sekolah berperan sebagai garda depan dalam upaya bantuan mengembangkan potensi dan mengentaskan masalah peserta didik demi terwujudnya SDM berkualitas. Guru BK/konselor bertanggungjawab dalam menyiapkan peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dan pertahanan hidup yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Urgensi Bimbingan dan Konseling Komprehensif Di Indonesia**

Menurut Supriatna (2011), bimbingan dan konseling komprehensif merupakan model bimbingan dan konseling yang berpegang pada prinsip bimbingan dan konseling perkembangan. Bimbingan dan konseling perkembangan bertolak dari asumsi bahwa perkembangan yang sehat terjadi melalui interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa pengembangan lingkungan perkembangan atau ekologi perkembangan manusia merupakan wahana strategis perkembangan siswa yang harus dikembangkan konselor. Lingkungan

perkembangan adalah lingkungan belajar yang terstruktur dan secara sengaja dirancang untuk memberi peluang kepada siswa mempelajari perilaku baru, membentuk ekspektasi dan persepsi, memperbaiki dan bahkan mengganti perilaku yang tidak sesuai, memperhalus dan menginternalisasi perilaku.

Menurut Dede Rahmat Hidayat (2013), model bimbingan dan konseling komprehensif merupakan respons terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh *American School Counseling Association*(ASCA). Meskipun model ini diadopsi dari model ASCA di Amerika Serikat, namun model ini dapat diadaptasi di Indonesia. Kemungkinan adaptasi model ASCA di Indonesia sangat terbuka, karena model ini memberikan kerangka berpikir dan kerangka kerja yang fleksibel. Dengan fleksibilitas tersebut, model ini dapat diadaptasi untuk pengembangan bimbingan dan konseling di Indonesia.

Profesi bimbingan dan konseling di Indonesia dewasa ini telah mengalami perkembangan dan peningkatan eksistensi yang semakin kokoh. Akan tetapi, masih ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan implementasi bimbingan dan konseling dimana pekerjaan dalam layanan bimbingan dan konseling lebih merupakan pekerjaan administratif, seperti pengecekan kehadiran siswa, pemberian sanksi keterlambatan, pencatatan poin pelanggaran siswa, dan lain sebagainya. Selain itu, juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realita kondisi peserta didik sebagai objek bimbingan. Hal ini menjadi kebutuhan nyata akan perlunya penataan kerangka kerja bimbingan dan konseling untuk menjadi suatu layanan profesional, efektif dan proaktif.

Menurut Sunaryo Kartadinata (2010), perkembangan model penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang dicapai pada akhir abad 20 telah menunjukkan identitas profesi yang semakin kokoh. Model bimbingan dan konseling (perkembangan) komprehensif adalah model yang menaruh perhatian penuh kepada seluruh peserta didik, bekerja bersama dengan orang tua, guru, administrator, dan stakeholder lainnya. Riset yang berbasis pada model komprehensif memberikan

penguatan untuk dikokohkannya model ini sebagai model bimbingan dan konseling di sekolah, namun masih belum tersosialisasikan kepada seluruh sekolah dan belum menjadi kebijakan nasional, substansi bimbingan dan konseling masih memerlukan pengembangan. Arah perkembangan ini perlu ditindaklanjuti dan ditegaskan dalam agenda abad 21.

Untuk dapat merealisasikan pengembangan model bimbingan dan konseling komprehensif di abad 21 tidaklah mudah. Upaya pengembangan sudah harus dirintis dan dipersiapkan mulai dari sekarang. Apalagi, sekarang ini berlaku kurikulum 2013 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bimbingan dan konseling juga harus berkontribusi dalam implementasi kurikulum ini dengan menggunakan model bimbingan dan konseling komprehensif.

Menurut Sunaryo Kartadinata (2015), bimbingan dan Konseling dalam kurikulum 2013, secara filosofis, konseptual dan legal formal dituangkan dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud ini adalah payung hukum eksistensi dan acuan utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, khususnya pada jalur pendidikan formal jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### 3. Implementasi Permendikbud No. 111 Tahun 2014 Di Sekolah Menengah

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah di Indonesia. Permendikbud ini dimaksudkan memberikan arah penyelenggaraan bimbingan dan sekolah dalam implementasi kurikulum 2013.

Menurut Uman Suherman (2015), urgensi dari permendikbud ini adalah untuk memastikan eksistensi layanan bimbingan dan konseling, menegaskan tenaga pelaksana layanan bimbingan dan konseling, dan menjaga konsistensi konsep kelimuan bimbingan dan konseling yang berimplikasi pada tujuan, fungsi dan prosedur layanan.

Menurut Sunaryo Kartadinata (2015), bimbingan dan konseling memiliki eksistensi yang potensial dan kontribusi yang besar dalam penegasan kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa peran bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 yang meliputi:

- a. **Integrator:** memfasilitasi perkembangan perilaku jangka panjang dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional secara utuh.
- b. **Proses:** mendukung pembelajaran yang mendidik melalui layanan bimbingan dan konseling belajar.
- c. **Diferensiasi(peminatan):** menyelenggarakan advokasi aksesibilitas pilihan program dan layanan serta rekaya lingkungan perkembangan
- d. **Asesmen:** melakukan asesmen proses dan hasil, mendiagnosis masalah perkembangan dan belajar serta memberikan bantuan penanganannya.

Untuk dapat berperan maksimal dalam implementasi kurikulum 2013, maka sosialisasi dan promosi terkait bimbingan dan konseling komprehensif harus ditingkatkan. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 perlu dipahami secara menyeluruh. Setiap butir substansi dalam Permendikbud ini harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan dengan baik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan/dilakukan dalam implementasi bimbingan dan konseling komprehensif adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman yang mendalam terhadap asumsi bimbingan dan konseling perkembangan beserta prinsip aplikasinya
- b. Peningkatan kompetensi guru BK/konselor dalam teori dan praksis bimbingan dan konseling komprehensif
- c. Penggunaan asesmen peserta didik dan lingkungan sebagai dasar acuan dalam penyusunan rancangan program layanan bimbingan dan konseling yang tepat.
- d. Pengembangan komponen layanan bimbingan dan konseling secara komprehensif.
- e. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengutamakan kolaborasi antar personel sekolah

- f. Pelibatan lingkungan sosial dalam penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling (kolaborasi)

Beberapa rambu-rambu dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan Permendikbud No. 111 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan program bimbingan dan konseling didasarkan pada sistematika program, yang meliputi: (1) rasional, (2) visi dan misi, (3) deskripsi kebutuhan, (4) tujuan, (5) komponen program, (6) bidang layanan, (7) rencana operasional (*action plan*), (8) pengembangan tema/topik, (9) evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, dan (10) anggaran biaya.
- Penyusunan program bimbingan dan konseling mencakup program tahunan dan program semesteran
- Komponen layanan bimbingan dan konseling terdiri dari 4 (empat) layanan:  
*Layanan Dasar*, sebagai pemberian bantuan melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan.  
*Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual*, sebagai bantuan untuk merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, peluang dan kesempatan yang ada di lingkungan.  
*Layanan responsif*, sebagai proses bantuan untuk menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, supaya peserta didik tidak mengalami hambatan dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan.  
*Dukungan sistem*, sebagai proses bantuan atau fasilitasi atau dukungan secara tidak langsung terhadap kelancaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
- Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas dilakukan secara tatap muka terjadwal dan

rutin setiap kelas/per minggu dengan alokasi waktu 2 (dua) jam. Bidang layanan mencakup 4 (empat) bidang layanan dengan materi layanan yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBK).

- Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi kegiatan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konferensi kasus, kunjungan rumah (*home visit*), advokasi, alih tangan kasus, pengelolaan media informasi (website, leaflet, papan bimbingan dan konseling), pengelolaan kotak masalah, dan kegiatan lain termasuk manajemen program, penelitian dan pengembangan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Alokasi waktu dihitung secara ekuivalen berdasarkan beban kerja guru BK/konselor di sekolah. Tiap-tiap kegiatan alokasi waktunya rata-rata ekuivalen dengan 2 jam pelajaran, tetapi dengan rincian jumlah pertemuan yang berbeda-beda.
- Beban kerja seorang guru BK/konselor adalah 150 – 160 peserta didik ekuivalen dengan 24 jam pelajaran.
- Alokasi waktu untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah adalah sebagai berikut:

Program	SMP/MTs	SMA/MA/SMK/MAK
Layanan Dasar	35 – 45 %	25 – 35 %
Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual	15 – 25 %	25 – 35 %
Layanan Responsif	25 – 35 %	15 – 25 %
Dukungan Sistem	10 – 15 %	10 – 15 %

- Mekanisme pengelolaan bimbingan dan konseling mencakup tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program.
- Bimbingan dan konseling dapat disetting dalam bentuk layanan individual, kelompok,

klasikal, dan kelas besar atau lintas kelas. Bentuk kegiatan bimbingan dan konseling dapat berupa bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan individual, konseling individual, konseling kelompok atau advokasi. Proses kegiatan bimbingan dan konseling dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun menggunakan media tertentu.

- j. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling perlu ditunjang oleh ketersediaan ruangan yang memadai, kelengkapan fasilitas penunjang (dokumen, instrumen pengumpul data, dan kelengkapan administrasi) dan ketersediaan anggaran biaya operasional.
- k. Penerapan kolaborasi dengan personel sekolah dan pihak terkait lainnya sangat diprioritaskan. Guru BK/konselor adalah koordinator program, bertugas mengkoordinir personel sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, staf tata usaha, komite sekolah, dan orang tua) dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah.

## C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Salah satu tuntutan dalam MEA adalah SDM bermutu. SDM bermutu dapat dibentuk melalui proses pendidikan, yang melibatkan layanan bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan peserta didik dan potensi lingkungan sosial yang dapat berkolaborasi. Bimbingan dan konseling komprehensif sangatlah urgen di tengah problematika bimbingan dan konseling di Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk dijadikan rujukan utama penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Berbagai substanti tentang teori dan praksis bimbingan dan konseling termaktub di dalamnya. Orientasi bimbingan dan konseling yang mengarah pada perkembangan, penggunaan asesmen peserta didik dan lingkungan dan penekanan prinsip

kolaborasi menjadi roh penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif. Guru BK/konselor dituntut untuk memahami, menginternalisasi dan mengimplementasikan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 sehingga bimbingan dan konseling sekolah dapat terselenggara secara efektif, efisien, profesional, dan proaktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boharudin. (2011). *Bimbingan dan Konseling*. Diakses melalui <http://boharudin.blogspot.co.id/201105/inovasi-bimbingan-dan-konselingmenjawab.html>, pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 14.16 WIB.
- Djohar. (2006). *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- Hidayat, Dede Rahmat. (2013). *Bimbingan Konseling: Kesehatan Mental Di sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Juntika. (2011). *Membangun Peradaban Bangsa Indonesia Melalui Pendidikan dan Komprehensif Bermutu*. Disampaikan dalam pidato Pengukuhan Prof. Dr. H. Juntika, M.Pd sebagai Guru Besar/Profesor dalam Bidang Bimbingan dan Konseling Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kartadinata, Sunaryo. (2010). *Isu-Isu Pendidikan: Antara Harapan dan Kenyataan*. Bandung: UPI Press.
- Kartadinata, Sunaryo. (2015). *Kerangka Konsep, Elemen Pokok, dan Implikasi Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Disampaikan dalam Kegiatan Pemantapan Instruktur Nasional Bimbingan dan Konseling, Jakarta, 29 – 30 Agustus 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Santoadi, Fajar. (2010). *Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.



- Saripah, Ipah. (2014). *Peran Layanan Bimbingan dan Konseling Komprehensif Dalam Pengembangan Karakter Anak*. Prosiding Seminar Nasional “Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Anak untuk Menyongsong Generasi Emas Indonesia”, 14 Desember 2014, ISBN: 978-6027-0296-5-1, hlm. 9-14.
- Suherman, Uman. (2015). *Implementasi Bimbingan dan Konseling Dalam Permendikbud 111 Tahun 2014*. Disampaikan dalam Forum Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS) Tahun 2015.
- Supriatna, Mamat. (2011). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.